



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Rencana Kerja

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tahun 2026



**Jalan. Jend. Gatot Subroto no. 361
Medan**



Bakesbangpol.sumutprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, dokumen ini memuat hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Kami sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional/daerah, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di masa yang akan datang. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**MULYONO, S.T, M.Si
PEMBINA UTAMA Muda
NIP. 19740511 200303 1 003**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	19
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	22
BAB V. PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari siklus sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah, diharapkan setiap Perangkat Daerah mampu merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjawab isu-isu aktual, permasalahan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat secara terarah dan terukur. Proses penyusunannya juga melibatkan pendekatan partisipatif dengan memperhatikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota atau provinsi.

Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah menjadi sangat penting guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Didalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
10. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16)
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

b. Tujuan

- 1) Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026;
- 3) Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun sebelumnya;
- 4) Mensinergikan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian dalam sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2, tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat

Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian program daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut dengan Tabel 2.3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Disajikan dengan Tabel 2.4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
 - a. Pencapaian target pembangunan daerah,
 - b. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah program berdasarkan realisasi dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat tahun-tahun sebelumnya, data evaluasi ini merupakan Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Kerja tahun yang lalu.

Berdasarkan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 764.677.705.622,- . dengan rincian :

- a) Belanja Barang dan Jasa.....Rp. 31.936.019.282,-
- b) Belanja ModalRp. 4.899.212.437,-
- c) Belanja PegawaiRp 8.846.052.374,-
- d) Belanja HibahRp 718.996.421.529,-

yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan yang meliputi urusan wajib dan urusan rutin. Dari jumlah anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 760.046.245.266,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,39 %. Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dengan anggaran Rp. 935.187.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 847.873.190,- atau terealisasi sebesar 90,66.%;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 9.956.708.374,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.810.578.975,- atau terealisasi sebesar 98,53 %;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.086.635.689,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.042.081.000,- atau terealisasi sebesar 95,90 %;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 7.955.348.321,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.600.083.533,- atau terealisasi sebesar 95,53 %;

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 1.785.934.585,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.413.793.863,- atau terealisasi sebesar 79,16 %
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang dengan anggaran Rp. 2.054.063.920,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.598.807.944,- atau terealisasi sebesar 77,84 %
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan :
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp. 3.820.761.927,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.422.412.012,- atau terealisasi sebesar 89,57%
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi politik dengan anggaran Rp. 713.513.690.429,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 713.400.849.936,- atau terealisasi sebesar 99,98 %
 4. Program Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp. 6.664.877.130,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.540.004.016,- atau terealisasi sebesar 98,13 %.
 5. Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 10.225.816.897,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.850.911.610,- atau terealisasi sebesar 76,78 %
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial dengan anggaran Rp. 6.878.680.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.718.849.187,- atau terealisasi sebesar 97,68%.
- Untuk rincian yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terdiri atas

- a. Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan wawasan kebangsaan dan revolusi mental;
- b. Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik;

- c. Jumlah ormas yang terbina dan aktif;
- d. Laporan rencana aksi penanganan konflik sosial;
- e. Jumlah kawasan bahaya Narkoba menjadi waspada

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat 3 Indikator yang tercapai namun ada 2 indikator yang tidak memiliki data karena adanya beberapa alasan seperti indikator Menahan Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara bahwa BNN tidak melakukan penelitian kembali terkait angka Prevalensi Narkotika di tingkat provinsi dan pada Indikator Perbaikan Laporan Rencana Aksi bahwa terdapat perpindahan subdirektorat ke Direktorat lainnya. Berikut kami sampaikan sejauh mana pencapaian target dan kinerja sebagaimana terdapat dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2024.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	1.400 Orang	1.600 Orang	1.800 Orang	1.800 Orang	1.600 Orang	1.800 Orang	
2	Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Politik	700 Orang	800 Orang	900 Orang	800 Orang	800 Orang	900 Orang	
3	Jumlah Ormas Yang Terbina dan Aktif	50 Ormas	60 Ormas	70 Ormas	103 Ormas	60 Ormas	70 Ormas	
4	Laporan Rencana Aksi Penanganan Konfli	Peringkat 8	Peringkat 7	Peringkat 6	-	Peringkat 7	Peringkat 6	
5	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba Menjadi Kawasan Waspada	270 Desa/ Kelurahan	260 Desa/ Kelurahan	250 Desa/ Kelurahan	-	260 Desa/ Kelurahan	250 Desa/ Kelurahan	

Dalam rangka mencapai visi misi Gubernur Sumatera Utara, data kinerja di atas memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dengan memperhatikan capaian kinerja, perencanaan daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul, serta memperkuat kinerja sektor – sektor yang telah mencapai hasil yang positif. Selanjutnya sesuai Permendagri 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memantau keberadaan dan aktivitas

Organisasi Masyarakat yang ada di wilayahnya. Pada tahun 2024 untuk data ormas yang ada di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan keberadaannya terdapat 118 Ormas. Terdapat pengurangan jumlah ormas yang melaporkan keberadaannya dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 119 Ormas. Hal ini menunjukkan perlunya antusias organisasi masyarakat dalam menyampaikan keberadaannya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun pada elemen masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

No.	Isu Strategis	Strategi & Arah Kebijakan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah	Meningkatkan penguatan dan Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dukungan regulasi dan kurikulum nasional, peran aktif tokoh masyarakat, dan dukungan organisasi kemasyarakatan	Minimnya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan muda, kurangnya anggaran untuk sosialisasi
2	Peningkatan Kualitas Demokrasi	Meningkatkan penguatan dan Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Keterlibatan KPU, Bawaslu, serta partisipasi pemilih yang tinggi	Politik uang, rendahnya literasi politik masyarakat, serta konflik kepentingan elit lokal
3	Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Meningkatkan Dialog dan Komunikasi Antar Kelompok dalam	Peran aktif FKUB, keberadaan tokoh agama yang	Isu SARA di media sosial, intoleransi, dan provokasi dari pihak

	Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian di daerah	rangka mewujudkan Harmonisasi Sosial Melalui Pendekatan Kultural dan Partisipatif	moderat, tradisi gotong royong	luar
4	Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah	Adanya forum koordinasi seperti FKDM dan Tim Terpadu, serta regulasi seperti Permendagri 42/2015	Lambatnya respons dini, lemahnya deteksi konflik di tingkat lokal
5	Fasilitasi dan sinergitas Penanganan Penyakit Masyarakat (Narkoba, Judi Online, LGBT, Pornografi, dan Prostitusi)	Pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi dengan memanfaatkan media digital dan konten kreatif	Kerja sama dengan BNN, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat	Akses internet bebas, lemahnya kontrol sosial dan regulasi daerah
6	Penguatan peran pemerintah dalam pengawasan, pemberdayaan ormas serta digitalisasi pendaftaran dan pemanfaatan data ormas	Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai	Digitalisasi SIPORDA, peningkatan kapasitas kelembagaan ormas	Banyak ormas tidak terdaftar dan tidak aktif melapor, serta potensi radikalisme terselubung
7	Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah	memperkuat deteksi, pencegahan, dan respon terhadap potensi gangguan stabilitas daerah	Keberadaan FKDM dan data intelijen daerah	Lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia pengamat lokal
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda	Meningkatkan peran Forkopimda sebagai forum dialog atas isu-isu strategis lokal yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional	Dasar hukum dan forum resmi Forkopimda sudah tersedia	Ego sektoral antar unsur Forkopimda dan lemahnya sinergi lintas sektor
9	Penguatan FKUB, FPK, FKDM, FPB dan PPWK dalam meningkatkan stabilitas ketahanan daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Keberadaan forum dengan dasar hukum jelas, dukungan APBD	Kurangnya pelatihan, minimnya anggaran pembinaan kelembagaan

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam mengawal program prioritas nasional dibutuhkan pola pendekatan yang efektif dengan cara kerja baru, inovasi baru salah satunya melalui pendekatan teknologi dan informasi. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain sinkronisasi program/kegiatan dan kemampuan sumberdaya manusia, hal ini berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas kita berharap persoalan bangsa dan negara yang harus kita tangani dengan baik sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, setidaknya ada 12 (dua belas) isu-isu yang menjadi perhatian yang membutuhkan formulasi yang dimuat dalam Perencanaan program dan kegiatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan maka dari hasil isu-isu strategis yang menjadi perhatian kita, maka efektifitas sasaran kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan juga menjadi perhatian terutama pada pencegahan dan penanggulangan pengguna Narkoba. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah melakukan inovasi yaitu dengan menambahkan beberapa jenis kegiatan yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan penghentian dan Pengendalian Peredaran Narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu dalam peningkatan pencegahan konflik sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera kembali melaksanakan PUSKOMIN (Pusat komunikasi dan Informasi) untuk berkoordinasi dengan Tim Aparat Keamanan serta memfasilitasi pertemuan koordinasi FORKOPIMDA.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam lampiran Tabel TC.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Sumatera Utara mengacu pada RPJPD dan RPJMD yang diterjemahkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD. Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Untuk rincian usulan dari pemangku kepentingan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Terwujudnya Bakesbangpol Provsu yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	12 Bulan	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Tercapainya Administrasi keuangan	12 Bulan	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Tercapainya Adminstrasi kepegawaian	3 Kali	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daertah	Sumatera Utara	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Tersedianya Administrasi Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Tersedianya Saran dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Sumatera Utara	Jumlah Peserta menerima penguatan ideologi Pancasila dan karakter 2 kebangsaan	1.600 Orang	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.600 Orang	
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Sumatera Utara	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Politik Dalam Negeri	800 Orang	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Politik Dalam Negeri	800 Orang	

	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik				
IV.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sumatera Utara	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	60 Ormas	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sumatera Utara	Jumlah Data Ormas yang terdaftar pada Kemenkumham dan Kemendagri	60 Ormas	
V.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , dan Budaya	Sumatera Utara	Jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada narkoba	260 desa/ kelurahan	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sumatera Utara	Jumlah Masyarakat yang menerima pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	700 Orang	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Sumatera Utara	<i>Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi</i> Konflik	Peringkat 7	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sumatera Utara	Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	300 Orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sasaran utama RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi Gas rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

8 (delapan) Agenda pembangunan RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah :

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Arah pembangunan pada RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah :

- a. Misi 1. Transformasi sosial : (a) Kesehatan untuk semua; (b) Pendidikan berkualitas yang merata, (c) Perlindungan sosial yang adaptif.
- b. Misi 2. Transformasi ekonomi : (a) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (b) Penerapan ekonomi hijau; (c) Transformasi digital; (d) Integrasi ekonomi domestik dan global; (e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

- c. Misi 3. Transformasi tata kelola : (a) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- d. Misi 4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia : (a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial; (b) Stabilitas ekonomi makro; (c) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- e. Misi 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi : (a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju; (b) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; (c) Lingkungan hidup berkualitas; (d) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; (e) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
- f. Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
- g. Misi 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- h. Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Melihat kepada arah pembangunan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terintegrasi ke dalam Misi 4, indikator yaitu Hukum Berkeadilan, kemananan nasional yang Tangguh dan demokrasi substansial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 2025 – 2029, Untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD Bakesbangpol Provsu tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Perubahan RPJMD, dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran Bakesbangpol Provsu adalah sebagai berikut :

Tujuan Perangkat Daerah merupakan dukungan terhadap tercapainya Arah Kebijakan Pemabangunan Sumatera Utara pada tahun 2025 yaitu Mengakselerasikan Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara dengan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 adalah ‘Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara” maka dari iu badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera memiliki

1. Tujuan :

Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM

2. Sasaran Strategis;

Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa indikator sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50
	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara	Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara	81.00	81.20	81.50	82.00	83.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai yang diusulkan dalam dokumen Rencana Kerja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 11 (Sebelas) kegiatan dan 38 (Tiga puluh Delapan) Sub kegiatan untuk tahun 2026 mendatang. Dari keseluruhan Program ada bersifat rutin maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Untuk melihat Rencana Program dan Kegiatan serta pagu anggaran dilihat dalam table T-C.29 serta Untuk melihat lebih rinci rencana Anggaran pada tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tahun anggaran 2025 terdapat 6 (Enam) Program dengan 11 (sebelas) 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan dan total pagu yang diusulkan sebesar Rp 87.352.561.211,- Dari 6 (Enam) Program terdapat 1 (satu) Program Rutin dan 5 (lima) Program Utama, secara ringkas untuk tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini meliputi kegiatan rutin penunjang pegawai dan pekerjaan kantor yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Dalam Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila serta Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam Masyarakat khususnya dilingkungan Provinsi Sumatera Utara. Dalam program ini akan diterjemahkan beberapa bentuk kegiatan yang menunjang di bidang Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang meliputi :

- Pelaksanaan seleksi Paskibraka di Sumatera Utara
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Aparat, Kesbangpol dan Forum Forum Strategis dan Masyarakat Kab/Kota Se Sumut
- Sosialisasi Revolusi Mental Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
- Pelaksanaan Hari Bela Negara serta Peningkatan Kesadaran Bela Negara
- Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Melalui Fasilitasi Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Dalam Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemahaman Masyarakat terakiat politik serta dapat meningkatkan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan pilkada mendatang serta meningkatkan peran serta partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik di masyarakat. Dalam program ini akan diterjemahkan beberapa bentuk kegiatan yang menunjang di bidang Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang meliputi :

- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara
- Pendidikan Politik kepada Masyarakat Kab/Kota
- Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu
- Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Parpol
- Rapat koordinasi Persiapan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
- Orientasi dan Bimtek Tim Pemantau Perkembangan Politik Kab/Kota dalam rangka Pilkada Serentak
- Sosialisasi Etika dan Budaya Politik di provsu
- Forum Komunikasi Parpol dengan Kesbangpol Provsu
- Pemetaan Perkembangan Politik di Sumut
- Rapat koordinasi Pemilu/Pilpres Kab/Kota

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Program ini diharapkan dapat meningkatkan peran organisasi di masyarakat dalam membantu pemerintah provinsi untuk memabangun Sumatera utara yang

HEBAT melalui pembinaan dan pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Dalam program ini akan diterjemahkan beberapa bentuk kegiatan yang menunjang di bidang Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Ormas di Lingkungan Pemprov

- Sosialisasi Peraturan Perundangan Ormas
- Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- Rapat Koordinasi/Silaturahmi Ormas dengan Gubernur
- Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Dalam Program ini terdapat bentuk kegiatan yang diharapkan dalam menurunkan Tingkat pengguna Narkoba di Sumatera Utara. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 telah dibentuk kegiatan Strategis Derah yaitu Desa Bersinar di Kabupaten/Kota dengan membentuk 300 Desa/Kelurahan serta melantik 4.500 Relawan yang terbagi pada kawasan bahaya narkoba. Pada tahun 2025 mendatang diharapkan dapat mengoptimalkan Kembali Kegiatan Desa Bersinar sebagai tindak lanjut usaha menurunkan Tingkat pengguna Narkotika di Sumatera Utara kegiatan. Adapun bentuk kegiatan yang diusulkan dalam program tersebut Tahun 2025 meliputi :

- Pelaksanaan 200 DESA BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)
- Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Kab/Kota
- Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19
- Pelatihan/Konselor Adiksi Korban Penyalahgunaan NAPZA
- Rapat Koordinasi P4GN
- Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Pelatihan Kepada Mantan Pecandu Narkoba (*Lifeskill*)
- Bantuan Biaya Rehabilitasi Narkoba Untuk Keluarga Tidak Mampu
- Penyaluran Hibah Kepada FKUB dan FPB

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dalam Program ini diharapkan dapat mewujudkan Sumatera Utara yang aman dengan menjalankan fungsi deteksi dini dan kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik sosial. Dalam program ini akan diterjemahkan beberapa bentuk

kegiatan yang menunjang di bidang Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang meliputi Kegiatan yang diusulkan Tahun 2022 adalah:

- Penanganan Konflik Sosial
- Pusat Komunikasi dan Informasi
- Tim Kewaspadaan Dini
- Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
- Penggalangan Cipta Kondisi
- Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing
- Silahtruahmi Forkopimda
- Penyusunan Indeks Kewaspadaan
- Hibah FKDM

Pelaksanaan RAD (Rencana Aksi Daerah)-Pencegahan dan penanggulangan Ekstrisme berbasis kekerasan dan Terorisme

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan
Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Utara
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Urusan Pemerintahan Umum		Provinsi Sumatera Utara			APBD Provsu		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Provinsi Sumatera Utara		Rp 61.264.189.783	APBD Provsu		Rp 294.083.862.355,-
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 16.141.030.611, -	APBD Provsu	100%	Rp 20.254.635.086,-

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Provinsi Sumatera Utara	2 Dokumen	Rp 390.248.500,-	APBD Provsu		2 Dokumen	643.138.305
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan (1) Renja Tahun N dan (2) Perubahan Renja Tahun N	Provinsi Sumatera Utara	2 Dokumen	Rp 390.248.500,-	APBD Provsu		2 Dokumen	643.138.305
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan	Rp 9.643.887.641,-	APBD Provsu		1 laporan	11.143.180.203
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang memperoleh kesejahteraan / Tambahan penghasilan	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 8.410.238.009,-	APBD Provsu		100%	9.671.774.004
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 971.989.632,-	APBD Provsu		100%	1.117.861.700

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 261.660.000,-	APBD Provsu		100%	353.544.500
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan Kompetensi Aparatur	Provinsi Sumatera Utara	2 Orang	Rp 337.560.000,-	APBD Provsu		2 Orang	334.425.750
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kompetensi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Provinsi Sumatera Utara	2 Orang	Rp 337.560.000,-	APBD Provsu		2 Orang	334.425.750
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 94.065.270,-	APBD Provsu		100%	114.868.394
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 1.242.038.240,-	APBD Provsu		100%	1.593.555.822
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan	Provinsi Sumatera	100%	Rp 399.834.224,-	APBD Provsu		100%	466.992.771

				Logistik Kantor	ra Utara					
			Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provins i Sumate ra Utara	100%	Rp 178.949.400,-	APBD Provsu	100%	212.010.895
			Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Provins i Sumate ra Utara	1 Koran	Rp 46.500.000,-	APBD Provsu	1 Koran	57.401.928
			Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provins i Sumate ra Utara	100%	Rp 776.741.000,-	APBD Provsu	100%	934.158.800
			Administrasi Umum Perangkat Daertah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan adminstrasi umum	Provins i Sumate ra Utara	1 Dokumen	Rp2.738.128.134,-	APBD Provsu	1 Dokumen	3.378.988.610
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	Provins i Sumate ra Utara	100%	Rp 2.216.802.976,-	APBD Provsu	100%	2.570.948.198

				daerah							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 19.920.000,-	APBD Provsu		100%	23.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 774.150.000,-	APBD Provsu		100%	909.129.979
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 1.422.732.976,-	APBD Provsu		100%	1.638.818.219
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 814.403.360,-	APBD Provsu		100%	2.183.954.020
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Provinsi Sumatera Utara	100%	Rp 334.300.00,-	APBD Provsu		100%	518.419.374

				pajak dan perizinan kendaraan						
			Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provins i Sumate ra Utara	100%	Rp 259.759.980,-	APBD Provsu	100%	278.707.095
			Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Provins i Sumate ra Utara	100%	Rp220.343.380 ,-	APBD Provsu	100%	1.386.827.550
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Provins i Sumate ra Utara	70 %	Rp 2.326.393.711, -	APBD Provsu	72 %	3.421.874.997
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sekolah SMA/SMK/ MA yang mengikuti Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter	Provins i Sumate ra Utara	1400 Sekolah	Rp 2.326.393.711, -	APBD Provsu	1500 Sekolah	3.421.874.997

				Kebangsaan						
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 49.999.800,-	APBD Provsu	1 Dokumen	128.733.990
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 150.000.000,-	APBD Provsu	1 Dokumen	172.500.000

				Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun							
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	Rp 120.000.250,-	APBD Provsu		600 Orang	191.517.550
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	0	APBD Provsu		600 Orang	100.000.000

			Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provins i Sumate ra Utara	1 laporan	0	APBD Provsu	1 laporan	100.000.000
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Provins i	76 Orang	Rp 2.006.393.661,	APBD Provsu	76 Orang	2.729.123.457

					Sumatera Utara		-				
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada kader partai Politik	Provinsi Sumatera Utara	70 %	Rp 35.549.954.300,-	APBD Provsu		75 %	41.655.544.950
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kader politik yang menerima pendidikan politik	Provinsi Sumatera Utara	300 Orang	Rp 35.549.954.300,-	APBD Provsu		500 Orang	41.655.544.950
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 0	APBD Provsu		1 Dokumen	115.000.000

			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 22.830.000,-	APBD Provsu		1 Dokumen	74.357.850

				Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Provinsi Sumatera Utara	300 Orang	Rp 35.378.193.250,-	APBD Provsu		500 Orang	40.824.717.848

					Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumatera Utara	100 Orang	Rp 148.931.050,-	APBD Provsu		100 Orang	287.500.000

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan	Rp 148.931.050,-	APBD Provsu		1 laporan	353.969.253
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terbina	Provinsi Sumatera Utara	25 %	Rp 1.296.972.000,-	APBD Provsu		25 %	4.375.124.400

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Provinsi Sumatera Utara	70 Ormas	Rp 1.296.972.000,-	APBD Provsu		75 Ormas	4.375.124.400
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	0	APBD Provsu		1 Dokumen	115.000.000
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di	Jumlah Kebijakan di	Provinsi	1 Dokumen	Rp 350.000.000,-	APBD Provsu		1 Dokumen	3.634.000.000

			Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Sumatera Utara						
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	Rp 904.096.000,-	APBD Provsu		600 Orang	225.786.400

				di Daerah						
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	0	APBD Provsu	600 Orang	172.500.000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan	Rp 42.876.000,-	APBD Provsu	1 laporan	227.838.000

				Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , dan Budaya	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Provinsi Sumatera Utara	100 %	Rp 4.549.839.191, -	APBD Provsu	100%	4.758.677.000
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Organisasi yang aktif	Provinsi Sumatera Utara	9 Kegiatan	0	APBD Provsu	10 Kegiatan	4.758.677.000
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	0	APBD Provsu	1 Dokumen	115.000.000

				Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun							
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	Rp 650.000.000,-	APBD Provsu		600 Orang	3.677.332.000
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Jumlah Orang yang	Provinsi	500 Orang	Rp 3.667.089.191,	APBD		600 Orang	333.845.000

			Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sumatera Utara		-	Provsu			
			Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan	Rp 232.750.000,-	APBD Provsu		1 laporan	115.000.000

				Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
			Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Provins i Sumate ra Utara	100 %	Rp 1.399.970.970, -	APBD Provsu		100%	3.449.960.785
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfil Sosial	Jumlah Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik yang dilaksanakan	Provins i Sumate ra Utara	7 Laporan	Rp 1.399.970.970, -	APBD Provsu		8 Laporan	3.449.960.785
			Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	Provins i Sumate ra Utara	1 Dokumen	Rp 154.817.000,-	APBD Provsu		1 Dokumen	229.999.885

			Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, enaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 200.000.000	APBD Provsu		1 Dokumen	230.000.000

				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	Rp 342.607.970.-	APBD Provsu		600 Orang	574.999.885

				Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Provinsi Sumatera Utara	500 Orang	Rp 138.790.000,-	APBD Provsu		600 Orang	230.000.000

					Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provins i Sumate ra Utara	1 laporan	Rp 504.523.000,-	APBD Provsu		1 laporan	919.999.885

			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Provin si Sumate ra Utara	1 Dokumen	Rp 59.262.000,-	APBD Provsu		1 Dokumen	1.264.961.130
--	--	--	--	---	----------------------------------	------------------	------------------------	--------------------	--	------------------	----------------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Sumatera Utara tahun 2026, disamping itu untuk bahan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan kedepannya.

Melalui dokumen ini juga diharapkan Penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan Upaya penjabaran tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera utara akan lebih terkoordinasi, terinterigasi dan sehingga bermanfaat bagi Masyarakat Sumatera Utara.

Medan, 2025
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MULYONO, S.T, M.Si
PEMBINA UTAMA Muda
NIP. 19740511 200303 1 003